



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 304 TAHUN 2024

**TENTANG
ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DISERAHKAN
KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 81 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan mengenai arsip yang akan diserahkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
 - b. bahwa hasil penilaian Panitia Penyerahan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Nomor 24731/KA/09/2024 tanggal 7 September 2024, berkas arsip usul serah yang telah diverifikasi memiliki nilai guna kesejarahan dan berketerangan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan dapat diusulkan untuk diserahkan;

- c. bahwa permohonan penyerahan arsip statis melalui Surat Permohonan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.02/5100/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Diserahkan Kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 219 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menyerahkan arsip statis substantif sebanyak 11 (sebelas) berkas ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menghapus berkas arsip sebanyak 11 (sebelas) berkas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Inventaris Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Menugaskan Arsiparis untuk melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis.
- KEEMPAT : Arsiparis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib membuat Laporan Pelaksanaan Penyerahan Arsip LKPP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 304 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Kesehatan tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019 Dan Nomor HK/03.01/II/1051/2019	2019	5	Lembar	Asli	
2	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024	2020	1	Sampul	Asli	
3	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024	2020	1	Sampul	Asli	

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
4	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2020	1	Sampul	Asli	
5	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan	2020	6	Lembar	Asli	
6	Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan	2020	5	Lembar	Asli	
7	Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan	2020	3	Lembar	Asli	
8	Nota Kesepahaman Nomor 41 Tahun 2020 dan Nomor 417/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/06/2020 Roni Dwi Susanto Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Johnny G. Plate Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia	2020	1	Lembar	Asli	
9	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor 43 Tahun 2020	2020	7	Lembar	Asli	

NOMOR	JENIS/URAIAN INFORMASI ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH ARSIP		TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>
10	Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Pertanian tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 865/HK.230/A/02/2020	2020	5	Lembar	Asli	
11	Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Deputi Bidang Proteksi Bdan Siber dan Sandi Negara Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020, dan Nomor PERJ.70/BSSN/BS/KH.02.01/05/2020	2020	9	Lembar	Asli	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI